

**STRATEGI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO OLEH DINAS PARIWISATA
PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM DI DESA PARIGI
KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN**

Oleh

NETI SUNARTI

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan

FISIP Universitas Galuh Ciamis

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan belum maksimalnya pemanfaatan potensi perekonomian di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Maka rumusan masalah penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana Strategi Pemberdayaan UKM Oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam Strategi Pemberdayaan UKM Oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimana upaya-upaya yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Strategi Pemberdayaan UKM Oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran? Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 14 orang. Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa : 1) Strategi Pemberdayaan UKM Oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran telah dilaksanakan walaupun belum optimal. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Strategi Pemberdayaan UKM Oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan baik dibuktikan dengan masih terdapat permasalahan yang menyebabkan strategi pemberdayaan UKM belum sesuai dengan yang diharapkan yaitu masih rendahnya sumberdaya yang dimiliki pelaku UKM dan masih belum optimalnya bantuan modal. 2) Hambatan-hambatan dalam Strategi Pemberdayaan UKM Oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil wawancara antara lain disebabkan oleh kurangnya pembinaan dan pelatihan yang merata terhadap para pelaku UKM, terbatasnya anggaran dan pegawai yang dimiliki oleh dinas, kurangnya partisipasi pengusaha dalam memberikan bantuan modal terhadap pelaku UKM. 3) Adapun upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam Strategi Pemberdayaan UKM Oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dengan cara melakukan sosialisasi serta pembinaan terhadap para pelaku UKM dan koperasi serta menjalin kerjasama dengan pengusaha-pengusaha dalam mengembangkan usaha mikro agar lebih kreatif dan inovatif dalam menghasilkan suatu produk.

Kata kunci : Strategi, Pemberdayaan, UKM

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar tahun 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi Daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

MODERAT

Modern dan Demokratis

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggungjawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

Salah satu sumber potensi ekonomi yang ada di Desa Parigi yaitu berupa Usaha mikro. UMKM yang ada di Desa Parigi yaitu 49 pengusaha terbagi menjadi beberapa kelompok diantaranya UMKM Makanan Olahan berjumlah 21 seperti usaha mikro keripik, tahu, tempe, kecap, kue kaldu & ranginan, terasi, comet, sale, nata de coco, dan kue lapis. UMKM Huler Gabah berjumlah 5 pengusaha. UMKM Perdagangan berjumlah 12 pengusaha. UMKM Gergaji kayu berjumlah 6 pengusaha. Dari UMKM yang ada di Desa Parigi pada saat ini yang masih aktif hanya sekitar 20 pengusaha saja.

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan menengah kriteria kekayaan bersih atau penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Usaha kecil menengah (UKM) barangkali merupakan salah satu andalan utama bagi ketahanan ekonomi sebuah negara. Pemberdayaan usaha kecil menengah ini mungkin akan menjadi kunci utama agar perekonomian negeri ini menjadi lebih baik. Gerak sektor UKM amat vital untuk menciptakan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan.

Pembinaan pengusaha kecil harus lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah. Namun, disadari pula bahwa pengembangan usaha kecil menghadapi beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran dan keuangan. Lemahnya kemampuan manajerial dan sumberdaya manusia ini mengakibatkan

pengusaha kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran apabila ditinjau dari tingkat usaha mikro di Desa Parigi Kecamatan Kabupaten Pangandaran masih belum berkembang, seperti dapat terlihat dari beberapa indikator, di antaranya :

1. Belum optimalnya pemanfaatan potensi perekonomian yang dapat dikembangkan oleh pemerintah terkait dengan usaha mikro yang ada di sekitar desa Parigi.
2. Minimnya pengetahuan atas teknologi produksi dan quality control yang didapat oleh para pengusaha usaha mikro diduga karena belum optimalnya pendidikan dan pelatihan pada usaha mikro di Desa Parigi oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM.
3. Masih terbatasnya modal usaha yang dimiliki para pengusaha mikro karena hanya mengandalkan modal sendiri yang jumlahnya terbatas diduga Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM belum sepenuhnya membantu pengusaha mikro untuk mencari sumber dana.

Dari latar belakang penelitian di atas, maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 1) Bagaimana Pemberdayaan Usaha Mikro Oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran ? 2) Apa saja yang menjadi kendala kendala dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran ? 3) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran ?

METODE

Metode Penelitian yang di pakai adalah metode deskriptif analisis. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 10 bulan. Informan dalam penelitian ini yaitu 9 orang yang semuanya berasal dari pegawai

Disparindagkop dan UMKM, 5 orang yang berasal dari semua pengusaha mikro. Teknik pengumpulan data adalah :

- a. Studi Pustaka (*Literature study*)
- b. Studi Lapangan:
 1. Observasi
 2. Wawancara (*interview*)

LANDASAN TEORI

Secara etimologi strategi adalah turunan dari kata dalam bahasa Yunani, *strategos*. Adapun *strategos* dapat diterjemahkan sebagai "komandan militer" pada zaman demokrasi Athena. Pada mulanya istilah strategi digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan.

Sedangkan secara terminologi strategi merupakan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, di antara para ahli yang merumuskan tentang definisi strategi tersebut salah satu proses di mana untuk mencapai suatu tujuan dan berorientasi pada masa depan untuk berinteraksi pada suatu persaingan guna mencapai sasaran.

Menurut Pranaka (dalam Sedarmayanti, 2003:113) menyatakan bahwa munculnya konsep pemberdayaan pada awalnya menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat, organisasi atau individu agar menjadi lebih berdaya. Selanjutnya menekankan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, tepatnya dinyatakan dalam pasal 1, UMKM dapat dijelaskan secara terperinci berikut ini:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha

perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Adanya berbagai kelemahan yang dihadapi UKM mengakibatkan sulitnya para UKM untuk mempertahankan diri tetap eksis, apalagi adanya tuntutan peningkatan kualitas maupun kuantitas.

Hal ini mengingat keberadaan UKM sangat penting dipertahankan guna membantu mengatasi berbagai masalah-masalah ekonomi dan sosial, khususnya yang berkaitan dengan upaya mengatasi pengangguran serta pengentasan kemiskinan. Dalam skala makro, upaya menumbuhkembangkan UKM sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Tujuan pemberdayaan dimaksudkan membantu meningkatkan potensi UKM agar memiliki peluang hidup dan berkembang dalam rangka menghadapi persaingan yang sehat. Pemberdayaan usaha kecil dan menengah merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan dari sebagian terbesar rakyat Indonesia, khususnya melalui lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan UKM telah dijalankan.

MODERAT

Modern dan Demokratis

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Selanjutnya menurut Pramiyanti (2008:17-18) pemerintah saat ini telah menjalankan strategi pemberdayaan UKM yang dapat diklasifikasikan ke dalam:

1. Aspek manajerial yang meliputi: peningkatan produktivitas/ omset/ tingkat utilisasi/ tingkat hunian, meningkatkan kemampuan pemasaran, dan pengembangan sumberdaya manusia.
2. Aspek permodalan yang meliputi: bantuan modal (penyisihan 1-5% keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha kecil minimum 20% dari portofolio kredit bank) dan kemudahan kredit (KUPEDES, KUK, KIK, KMKP, KCK, Kredit Mini/Midi, KCU).
3. Mengembangkan program kemitraan dengan besar usaha, baik melalui sistem Bapak-Anak Angkat, PIR, keterkaitan hulu-hilir (forward linkage), keterkaitan hilir-hulu (backward linkage), modal ventura, ataupun subkontrak.
4. Pengembangan sentral industri kecil dalam suatu kawasan, apakah berbentuk PIK (Pemukiman Industri Kecil), LIK (Lingkungan Industri Kecil), SUIK (Sarana Usaha Industri Kecil), yang didukung oleh UPT (Unit Pelayanan Teknis) dan TPI (Tenaga Penyuluh Industri).
5. Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat KUB (Kelompok Usaha Bersama), KOPINKRA (Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan).

Alat ukur tersebut dijadikan landasan/dasar untuk mengukur keberhasilan dalam Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran sehingga bisa terwujud perekonomian rakyat yang lebih baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Pemberdayaan UKM oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran ternyata Strategi Pemberdayaan UKM oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan optimal apabila disesuaikan dengan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam Strategi Pemberdayaan UKM yang memuat bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Strategi Pemberdayaan UKM yaitu sebagai berikut :

1. Aspek Manajerial

Aspek manajerial merupakan proses perencanaan, penyusunan, pengarahan dan pengawasan.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyatakan bahwa :

Pemerintah dan Pemerintahan Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang: Produksi dan pengolahan; Pemasaran, Sumber daya manusia; dan Desain dan teknologi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam aspek manajerial Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Pangandaran sudah dilaksanakan dengan baik melalui mengikutsertakan para pelaku UKM ke dalam pameran-pameran yang ada di dalam maupun diluar kota sehingga dapat memasarkan hasil produksinya lebih luas lagi.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, diketahui bahwa tidak semua para pelaku UKM dapat diikutsertakan dalam pameran yang dilakukan oleh pihak dinas karena adanya pemilihan dalam produk unggulan disetiap UKM.

2. Aspek Permodalan

Permodalan merupakan faktor utama yang diperoleh untuk mengembangkan suatu unit usaha. Setiap kegiatan usaha mengharuskan

untuk berkembang dan maju, untuk itu setiap usaha selalu memerlukan dana untuk membiayai keperluan operasionalnya.

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2013 : 173-174) mengemukakan konsep pemberdayaan yaitu:

Peningkatan akses ke dalam aset produksi (productive assets): tersedianya kredit yang memadai dapat menciptakan pembentukan modal bagi usaha rakyat sehingga dapat meningkatkan produksi dan pendapatan, serta menciptakan surplus yang dapat digunakan untuk membayar kembali kreditnya dan melakukan pempukan modal. Akses ke dalam modal harus diartikan sebagai keterjangkauan, yang memiliki dua sisi pertama yaitu ada pada saat yang diperlukan dan kedua yaitu dalam jangkauan kemampuan dan memanfaatkannya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam membantu aspek permodalan Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan baik karena dinas hanya sebatas memfasilitasi atau menjembatani sebagai fasilitator bukan sebagai pemberi modal bagi para pelaku UKM.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, diketahui bahwa selama ini para pelaku UKM hanya mengandalkan modal sendiri dan walaupun ada pinjam meminjam itu dengan usahanya sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak dinas.

3. Mengembangkan Program Kemitraan dengan Usaha Besar

Kemitraan merupakan strategi bisnis perusahaan di antara berbagai pihak yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Adapun faktor pendukung dalam proses pembinaan yaitu: tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, adanya akses informasi yang baik dalam rangka pemberdayaan UKM dan adanya kebijakan yang dibuat pemerintah Kabupaten Pangandaran yang menunjang keberhasilan pemberdayaan UKM yang berada di Desa Parigi Kabupaten Pangandaran.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu :

Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam mengembangkan program kemitraan dengan usaha besar Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Pangandaran belum cukup baik karena hal tersebut belum terfasilitasi oleh dinas terkait sehingga dinas belum bisa membantu untuk para pelaku UKM dalam mengembangkan program kemitraan dengan usaha besarnya.

Hal itu sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan, bahwa belum terfasilitasinya kerjasama antara pihak lain dengan para pelaku UKM sehingga pelaku UKM tidak dapat mengembangkan produksinya melalui bantuan dinas tetapi dengan cara sendiri yang dilakukan oleh pelaku UKM.

4. Pengembangan Sentra Industri Kecil dalam Suatu Kawasan

Pengembangan sentra industri kecil dalam suatu kawasan merupakan wadah sarana usaha untuk pelaku UKM dalam meningkatkan hasil produksi agar dapat berdaya saing dengan para pelaku UKM lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyatakan bahwa :

Pemerintah dan Pemerintahan Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang: Produksi dan pengolahan; Pemasaran, Sumber daya manusia; dan Desain dan teknologi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pengembangan sentra industri kecil dalam suatu kawasan oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan cukup baik terutama yang berada di Desa Parigi karena dengan terbatasnya jumlah pegawai yang dimiliki oleh pihak dinas belum dapat memberikan bantuan agar pengembangan sentra industri kecil bisa berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, diketahui bahwa Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan

MODERAT

Modern dan Demokratis

UMKM belum optimal dalam mengembangkan sentra industri kecil dalam kawasan hal itu karena belum adanya tenaga penyuluh yang diberikan oleh pihak dinas untuk para pelaku UKM.

5. Pembinaan Untuk Bidang Usaha dan Daerah Tertentu

Pembinaan merupakan tujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang tangguh dan mempunyai jiwa wirausaha. Sasaran yang ingin dicapai dalam pembinaan tersebut adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia sehingga terwujud suatu usaha yang kuat, mandiri, inovatif, dinamis, dan berdaya saing tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Pangandaran sudah dilakukan dengan cukup baik dalam memberikan pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu bagi para pelaku UKM dengan memberikan pelatihan-pelatihan atau penyuluhan dan pengarahan serta dinas terkait memfasilitasi tempat yang strategis bagi pemasaran produk UKM.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, diketahui bahwa pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu yang diberikan oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan baik yang disebabkan oleh rendahnya sumber daya manusia dan keterampilan yang dimiliki terutama oleh anggota di bidang koperasi dan UMKM serta kurangnya pengetahuan para pelaku UKM terhadap pembinaan yang dilakukan pihak dinas terkait.

Hambatan-Hambatan Yang Ditemui Oleh Oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dalam Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa adanya Hambatan-hambatan dalam strategi pemberdayaan UKM yang ditemui oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa ada beberapa hambatan yang menghambat kelancaran dalam strategi

pemberdayaan UKM oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM diantaranya adalah masih terbatasnya sumber daya yang dimiliki para pelaku UKM, masih terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh dinas, dan belum optimalnya bantuan modal yang diberikan pemerintah terhadap para UKM sehingga strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM belum sepenuhnya optimal. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan juga diketahui bahwa hambatan yang terjadi sebagian besar disebabkan karena adanya keterbatasan yang Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM miliki, seperti halnya ketersediaan sumber daya, kemampuan sumber daya,terbatasnya anggaran serta belum optimalnya bantuan modal yang dinas berikan terhadap para UKM.

Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dalam Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa adanya upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam strategi pemberdayaan usaha mikro hal ini dilakukan dengan memaksimalkan kemampuan yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM dengan cara memberikan pembinaan dan pelatihan secara merata dan mengadakan penyediaan permodalan bagi para pelaku UKM di Desa Parigi agar bisa berkembang lebih baik.

Begitu pula dengan hasil observasi diketahui bahwa sudah ada upaya yang dilakukan pemerintah dalam Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran yang antara lain dengan adanya sosialisasi serta pembinaan dan pelatihan terhadap para pelaku UKM agar Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dapat dilaksanakan dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan.

1. Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran telah dilaksanakan walaupun belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari informasi yang diperoleh dari 14 informan bahwa Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran yaitu masih rendahnya sumberdaya manusia, kurangnya pembinaan dan pelatihan bagi koperasi dan pelaku UKM, serta kurangnya bantuan modal yang didapat para pelaku UKM dalam mengembangkan usahanya. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Strategi Pemberdayaan UKM Oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan baik dibuktikan dengan masih terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro belum sesuai dengan yang diharapkan seperti masih rendahnya sumberdaya manusia yang dimiliki para pelaku UKM, kurangnya bantuan modal dan pembinaan bagi para pelaku UKM, serta masih belum optimalnya lembaga koperasi yang diharapkan bisa membantu meningkatkan kualitas hasil produksi UKM dalam mengembangkan usahanya, sehingga permasalahan tersebut menghambat keberhasilan Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.
2. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam strategi pemberdayaan Usaha Mikro oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa ada beberapa hambatan

yang menghambat kelancaran dalam strategi pemberdayaan Usaha Mikro oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM diantaranya adalah masih terbatasnya sumber daya yang dimiliki para pelaku UKM, masih terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh dinas, dan belum optimalnya bantuan modal yang diberikan pemerintah terhadap para UKM sehingga strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM belum sepenuhnya optimal. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan juga diketahui bahwa hambatan yang terjadi sebagian besar disebabkan karena adanya keterbatasan ketersediaan sumber daya, kemampuan sumber daya, terbatasnya anggaran serta belum optimalnya bantuan modal yang dinas berikan terhadap para UKM.

3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dalam strategi pemberdayaan usaha mikro, sudah dilaksanakan dengan cukup optimal, yaitu dengan memaksimalkan kemampuan yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM dengan cara memberikan pembinaan dan pelatihan secara merata terhadap para pelaku UKM di Desa Parigi sehingga pelaku UKM bisa lebih kreatif dan inovatif dalam menghasilkan suatu produk. Begitu pula dengan hasil observasi diketahui bahwa sudah ada upaya yang dilakukan pemerintah dalam Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran yang antara lain dengan adanya sosialisasi serta pembinaan dan pelatihan terhadap para pelaku UKM agar Strategi Pemberdayaan UKM oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dapat dilaksanakan dengan baik.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian maka saran yang hendak penulis sampaikan diantaranya:

1. Agar pelaksanaan Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dapat berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan kerjasama yang baik antara pihak terkait dalam hal ini yaitu Pemerintahan desa, instansi yang ada di Kabupaten Pangandaran serta Pemerintah Pusat (Menkop dan UKM) serta harus lebih memperhatikan Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu.
2. Dalam strategi pemberdayaan usaha mikro tidak dapat terlepas dari adanya hambatan yang mungkin terjadi dalam setiap pelaksanaannya, namun sebisa mungkin hambatan-hambatan tersebut bisa diminimalisir dengan melakukan beberapa upaya di antaranya yaitu dengan meningkatkan kemampuan sumber daya yang tersedia bahkan sebisa mungkin dapat ditunjang dengan saran dan prasarana yang memadai. Selain itu dinas juga seyogyanya memberikan pembinaan dan pelatihan yang merata terhadap para pelaku UKM supaya sumber daya manusia yang dimiliki oleh pelaku UKM bisa lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan produksinya
3. Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Disparindagkop dan UMKM untuk menanggapi hambatan yang terjadi selama pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro pada tahun 2013-2015 memang sudah dilakukan namun belum optimal. Upaya tersebut akan berjalan dengan baik apabila ada kerjasama yang baik dengan semua pihak yang terlibat, tidak hanya dilakukan oleh Dinasparindagkop dan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2002. *Pemikiran-Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: FEUI.
- Grant, Robert M. 1999. *Analisis Strategi Kontemporer, Konsep, Teknik, Aplikasi, Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga.
- Hadari, Nawawi. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Partomo, Tiktik Sartika dan Soejoedono. 2004. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah & Koperasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pramiyanti, Alila. 2008. *Studi Kelayakan Bisnis untuk UKM*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Sedarmayanti. 2003. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta : Bandung.
- Sugiyono.2010&2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, Tulus. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Keppres Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2001 Tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil & Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah/Besar dengan Syarat Kemitraan.
- Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kabupaten Pangandaran.